

## STRATEGI REFORMASI KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL<sup>1</sup>

Azhar Kasim  
Guru Besar FISIP UI  
Email: akasim2@yahoo.com

### Abstract

*The challenges that faced by Indonesia government bureaucracy nowadays, specially to execute public services in line with good governance principles are part of civil service system reform. In this critical condition of Indonesia civil service, even though The Law of Republic of Indonesia No 43/1999 mandated for Civil Servant Professionalism and Welfare, but the fact still not suitable to the expected condition. Civil service reform comprehensively need strong political will from the elite and support from all community elements to build Indonesia civil service system based on merit system and civil service planning that related to the government bureaucracy strategic planning.*

**Key words:** *Indonesia government bureaucracy, civil service reform, strategic planning.*

### Abstrak

Tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selaras dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari reformasi sistem kepegawaian. Dalam kondisi yang kritis ini, meskipun Undang-Undang No 43 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) mengamanatkan terciptanya Pegawai Negeri yang profesional dan sejahtera, namun kenyataannya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan, Reformasi kepegawaian secara luas perlu adanya kemauan politik dari para elit dan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem kepegawaian yang didasarkan atas sistem merit dan perencanaan kepegawaian yang terkait dengan perencanaan strategik birokrasi pemerintah.

**Kata kunci:** *Birokrasi pemerintahan Indonesia, reformasi kepegawaian, perencanaan strategik.*

### PENDAHULUAN

Semenjak tahun 1998 sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami banyak perubahan yaitu demokratisasi berbagai aspek pemerintahan seperti sistem kepartaian yang memungkinkan munculnya partai politik yang bebas dari kontrol penguasa dan bersaing satu sama lain; pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung; desentralisasi pemerintahan (otonomi daerah); privatisasi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan (administrasi publik) Indonesia dewasa ini. Disamping itu, birokrasi pemerintahan

diharapkan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga dimungkinkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, peningkatan efisiensi dan transparansi, dan pencegahan korupsi serta adanya pertanggungjawaban dari birokrasi pemerintahan kepada publik.

Di lain pihak, tren pemerintahan di dunia juga berubah khususnya peranan pemerintah dalam pelayanan publik, yaitu dari keterlibatan langsung pemerintah dalam Munculnya *e-government* telah memungkinkan penyelenggaraan sebagian besar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Pelayanan publik dapat diselenggarakan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu serta dapat menjangkau sampai

jauh ke pelosok nusantara asalkan ada fasilitas internet. Banyak negara di dunia termasuk negara yang sedang berkembang seperti India dan Malaysia sudah menerapkan *e-government* untuk penyelenggaraan berbagai jenis pelayanan publik secara *online* dan *real time*. Anggota masyarakat yang memerlukan layanan publik dapat memperolehnya tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Kelemahan *e-government* ini adalah munculnya gejala *digital divide* yaitu jurang pemisah antara orang kaya dan mampu menggunakan internet dengan kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu menggunakan internet. Pengalaman negara lain menunjukkan hal ini bisa diatasi dengan penyediaan "warung internet pemerintah" dengan petugas yang terlatih melayani mereka yang memerlukan jasa *e-government* di berbagai lokasi yang dekat dengan tempat kediaman anggota masyarakat yang membutuhkannya (Holmes, 2001).

Semua perubahan tersebut diatas mempengaruhi kebutuhan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Sekarang dan di masa mendatang, dibutuhkan Pegawai Negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi (*knowledge workers*). Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan, reformasi sistem kepegawaian negara agar dapat diperoleh PNS yang sesuai dengan kebutuhan.

## KESIMPULAN

Reformasi kepegawaian harus dalam rangka reformasi administrasi negara Indonesia. Reformasi kepegawaian yang komprehensif memerlukan *political will* yang kuat dari *elite* penguasa dan dukungan dari semua unsur masyarakat dalam rangka membangun sistem kepegawaian negeri

sipil Indonesia yang berdasarkan prinsip sistem merit. Reformasi kepegawaian harus berdasarkan suatu Perencanaan Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan Rencana Statejik Birokrasi Pemerintahan.

## REFERENSI

- Bacal, Robert. (1999). *Performance Management*. New York: McGraw-Hill.
- Balk, Walter L. (1996). *Managerial Reform and Professional Empowerment in the Public Service*. Westport, Conn.:Quorum Books.
- Caiden, Gerald E. (1969). *Administrative Reform*. Chicago: Aldine.
- Holmes, Douglas. (2001). *E-Gov: e-Business Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Lan, Zhiyong. (2001). Understanding China's Administrative Reform. *Public Administration Quarterly*, Winter 2001:24, 4, p.417.
- Shafrits, Jay M., Albert C. Hyde, and David H. Rosenbloom. (1981). *Personnel Management in Government: Politics and Process*. Second edition, revised and expanded. New York: Marcel Dekker, Inc.